

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kualitas pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan banyak pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui program dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan sekolah dalam mengelola institusinya. Upaya-upaya tersebut sebenarnya telah dilakukan Depdiknas sebelum era reformasi atau sebelum dilakukan otonomi daerah. Di mana pada waktu itu, telah diperkenalkan program pemberdayaan sekolah melalui Pengembangan Sekolah Seutuhnya (*Integrated School Development*). Namun, karena pengelolaannya sentralistik, program tersebut tidak banyak memberikan dampak positif, angka partisipasi pendidikan nasional maupun kualitas pendidikan tetap menurun. Ketidakberhasilan tersebut erat kaitannya dengan masalah manajemen. Berdasarkan hal tersebut muncullah pemikiran baru tentang pengelolaan pendidikan yang lebih memberikan keleluasaan kepada sekolah-sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas, maka pada era reformasi seiring dengan adanya otonomi daerah, diperkenalkan program pemberdayaan sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*).

SID (*Integrated School Development*) dan MBS hanya berbeda istilah, tetapi jiwa substansinya sama, karena keduanya mengutamakan pemberdayaan sekolah melalui departemen atau institusinya. Dalam hal ini SID merupakan idenya, sedangkan MBS adalah suatu cara bagaimana mengelola atau

melaksanakan ide tersebut. MBS akan terlaksana apabila didukung sumber daya yang professional, berintegritas dan berkemauan tinggi. Hal ini sejalan dengan kekuatan reformasi yang bersumber dari SDM yang berkualitas serta memiliki visi, transparansi dan pandangan jauh ke depan, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, tetapi senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Salah satu unsur SDM yang dimaksud adalah guru, karena guru merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan mutu pendidikan, guru berperan dalam proses belajar mengajar bagi peserta didiknya. Peningkatan kualitas SDM guru merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang pendidikan.

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, pendidikan mempunyai peran strategis dalam mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman. Keunggulan suatu bangsa tidak lagi mengandalkan kekayaan alam suatu negara, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM) ditentukan oleh mutu pendidikan yang dihasilkan negara tersebut. Tolak ukur mutu pendidikan didasarkan pada kondisi *output* dan *outcome* yang memenuhi syarat dalam menghadapi tuntutan zaman dalam upaya pemberdayaan manusia, maka pendidikan memegang peran yang sangat penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan peningkatan kualitas pendidikan tersebut. Salah satu masalah pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan khususnya pendidikan menengah kejuruan baik negeri maupun swasta, sekalipun usaha peningkatan mutu pendidikan ini telah dilakukan. Adapun faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu a) kualitas

tenaga pengajar yang kurang memadai, b) kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai, c) kurangnya dukungan dari pemerintah, d) kurangnya minat siswa terhadap pendidikan kejuruan, e) kurangnya perhatian terhadap kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Berbagai usaha yang telah dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan saran dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah, namun sekurang-kurangnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara signifikan antara lain disebabkan:

Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipilih semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produk tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan *output* yang dikehendaki. Dalam kenyataannya, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi, karena selama ini dalam menerapkan pendekatan *educational production function* terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan, padahal proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.

Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat bergantung pada keputusan birokrasi yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan

lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan.

Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya yang sekarang sedang dikembangkan adalah reorientasi penyelenggaraan pendidikan, melalui manajemen berbasis sekolah (*school based management*) atau dikenal dengan istilah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).

Fokus dari implementasi MPMBS terletak pada adanya upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan yang diukur dari input, proses, outputnya. Input sekolah, berapa siswa baru, kepemimpinan kepala sekolah, perencanaan kurikulum, sarana prasarana pendidikan dan sumber dana pendidikan, kelengkapan media pembelajaran, dan sebagainya. Untuk menghasilkan *output* dan atau *outcome* yang tinggi, maka *row input* perlu diproses secara berkualitas. Proses pelaksanaan pendidikan terpusat pada pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas. Dalam proses pembelajaran ini terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik yang melibatkan komponen pembelajaran lainnya seperti bahan pembelajaran,

metode lanjutan, sarana, media, dan lainnya. Tinggi rendahnya mutu pendidikan terletak pada pelaksanaan proses yang berkualitas. Sedangkan *outputnya* terletak pada kualitas lulusan yang dikeluarkan pada setiap jenjang pendidikan yang diukur dari perolehan nilai hasil dipakai di atas standar kompetensi lulusan, dan banyaknya lulusan yang terdapat pada dunia kerja dan melanjutkan studi pada jenjang pendidikan tinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional pada setiap jenjang dan satuan pendidikan seperti pendidikan dan latihan, peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan buku referensi pendidikan sampai peningkatan mutu manajemen sekolah. Karena itu pula, perlu kesiapan sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan operasional pendidikan. Sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi seluruh elemen esensial diharapkan muncul dari pemerintah baik kabupaten maupun kota. Pendidikan yang sebelumnya dikelola secara sentralistik (terpusat) diubah untuk mengikuti dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga pengelolannya bersifat desentralistik.

Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, telah menggariskan ketentuan minimum bagi satuan pendidikan formal agar dapat memenuhi mutu pendidikan. Sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan telah pula digariskan kebijakan mengenai pemerataan kesempatan pendidikan yang bukan hanya menambah fasilitas pendidikan secara kuantitatif, melainkan juga keseluruhan komponen secara kualitatif. Dengan kata lain adalah pemerataan kesempatan pendidikan

yang bermutu pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Termasuk dalam kebijakan ini adalah pengembangan pendidikan kejuruan (SMK).

Dengan peningkatan mutu guru sebagai tenaga profesional dan peningkatan mutu lulusan maka diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan sekaligus dapat memperlancar tercapainya tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003: 5) menyatakan “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Sejalan dengan hal tersebut, sekolah melakukan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, mulai dari berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, penyempurnaan kurikulum secara periodik, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sampai dengan meningkatkan manajemen berbasis sekolah. Semakin baik pendidikan suatu bangsa semakin baik pula kualitas bangsa tersebut. Secara faktual pendidikan menggambarkan aktivitas sekelompok orang seperti guru dan tenaga kependidikan lainnya melaksanakan pendidikan untuk orang-orang mudah dengan bekerjasama dengan orang-orang yang berkepentingan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat dengan pelaksanaan aspek-aspek manajemen berbasis sekolah. Priyono (2002: 6) menyatakan “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam mengambil keputusan yang partisipatif

yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah”. Kemudian Umaedi (2001:23) menyatakan bahwa aspek-aspek manajemen berbasis sekolah adalah perencanaan dan evaluasi, pengelolaan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan sarana, pengelolaan keuangan, pelayanan siswa dan hubungan sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dimaksudkan untuk menjamin semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat, dan di pihak lain semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi. Manajemen berbasis sekolah memberikan potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, guru dan administrator yang professional.

Implementasi manajemen berbasis sekolah merupakan usaha untuk memberdayakan potensi yang ada di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu langkah konkret peningkatan mutu pendidikan adalah pemberdayaan sekolah agar mampu berperan sebagai subjek penyelenggara pendidikan yang menyajikan pendidikan yang bermutu. Penerapan MBS merupakan suatu bidang reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia.

Pasaribu (2017:14) dalam penelitiannya Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional di Madrasah bahwa salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum

nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan. Namun sebagian lagi masih memprihatinkan, apalagi sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil, masih jauh dari yang diharapkan.

Sedangkan Siti Aminah, dkk (2015:1) dalam penelitiannya Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada MTsN Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa masalah Manajemen Berbasis Sekolah meliputi: (1) dalam aspek manajemen tenaga kependidikan, manajemen keuangan, dan pembiayaan perannya belum dijalankan secara optimal; (2) kendala yang dihadapi kepala madrasah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah antara kemandirian sekolah dan manajemen pengelolaan anggaran belum dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Sunanto (2015:51) dalam penelitiannya Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh menunjukkan bahwa masalah Manajemen Berbasis Sekolah meliputi (1) masih kurangnya partisipasi guru, komite sekolah dan peran masyarakat dalam menyusun program perencanaan, (2) dalam proses pembelajaran guru belum mampu untuk berkreasi, dan evaluasi program sehingga berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan, (3) gaya kepemimpinan kepala sekolah yang kurang demokratis dan cenderung memaksakan kehendak.

Jumari (2017:178) dalam penelitiannya menemukan hambatan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMAN 1 Raman Utara adalah kurangnya peran serta komite sekolah dalam pelaksanaan MBS di sekolah dan sikap sebagian kecil orangtua yang masih acuh tak acuh terhadap perkembangan anak di sekolah. Dan upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi MBS di SMAN 1 Raman Utara adalah dengan a) Melakukan sosialisasi MBS kepada orangtua siswa pada saat pembagian rapor kenaikan kelas, b) menyampaikan laporan tertulis kepada pihak komite sekolah terkait dengan program-program MBS, serta kendala yang dihadapi sekolah dan bantuan yang diperlukan sekolah.

Naibaho (2019:1) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa permasalahan manajemen berbasis sekolah (MBS) di SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi antara lain; a) transparansi dan akuntabilitas kepala sekolah belum bersifat terbuka, b) guru yang bersifat acuh terhadap peningkatan kualitas pendidikan, c) banyaknya peserta didik dengan karakter yang berbeda. Solusi mengatasi permasalahan yang dilakukan dengan, a) melakukan peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, dan b) memperkuat peran kepala sekolah. (4) Dampak implementasi MBS di SMA Negeri 1 Sumbul Kabupaten Dairi adalah; a) sekolah bebas melakukan perencanaan pendidikan, b) sekolah mampu mengembangkan perencanaan pendidikan, c) sekolah dapat memonitor dan mengevaluasi setiap hasil dan performanya kepada masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dan pelayanan pendidikan.

Dari studi dan pengamatan langsung peneliti pada April-Mei 2022 di SMK Negeri I Siatas Barita Barita bahwa Nilai Rapor Mutu Sekolah SMK Negeri I

Siatas Barita Tahun 2021 menunjukkan bahwa rapor mutu sekolah secara komponen input mendapatkan nilai 14,04 dengan predikat tidak baik, komponen proses mendapatkan nilai 13,37 dengan predikat tidak baik, komponen output mendapatkan nilai 10,00 dengan predikat tidak baik, komponen outcome mendapatkan nilai 8,87 dengan predikat tidak baik dan komponen impact mendapatkan nilai 14,40 dengan predikat tidak baik. Secara keseluruhan penilaian nilai rapor mutu sekolah di SMK Negeri I Siatas Barita dengan nilai rapor mutu 12,24 dan predikat tidak baik.

Rapot mutu sekolah menunjukkan predikat tidak baik dipengaruhi faktor-faktor kebijakan dalam peraturan. Faktor yang sering di sorot dan diperhatikan oleh pemerintah dan pemangku kebijakan adalah melakukan perubahan dari segi programnya (perubahan kurikulum) seperti implementasi manajemen berbasis sekolah. Pengimplementasian manajemen berbasis sekolah perlu dilakukan adanya perbaikan terhadap metode pengajaran, sarana dan prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, program (kurikulum) K13 Revisi yang ditetapkan belum mampu diimplementasikan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan, karena tidak diiringi oleh kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai, serta tidak pula ditunjang oleh manajemen yang baik, seperti tidak adanya monitoring atau kontrol yang intensif dan berkesinambungan terhadap upaya implementasi program (kurikulum) yang *sustainability*. Dengan berbagai hal tersebut menyebabkan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah menjadi kurang optimal sehingga mengakibatkan mutu pendidikan. Belum maksimal, terutama pada SMK Negeri I Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan pengamatan tersebut diperlukan adanya reformasi pendidikan yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri I Kecamatan Siatas Barita dewasa ini adalah desentralisasi pengelolaan pendidikan. Kesiapan daerah untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan sebenarnya masih baru dalam tahap kesiapan psikologis. Untuk menerapkan kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai bentuk alternatif yang dipilih dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan, kesiapan daerah dan lembaga pendidikan (sekolah) masih diragukan, karena untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi, terutama menyangkut sumber daya manusia, lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketiga persyaratan tersebut harus sinergi satu sama lainnya. Tanpa dukungan dari masyarakat dan dukungan sekolah, MPMBS sebagai model desentralisasi pendidikan. Dipilihnya MPMBS sebagai model desentralisasi pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah karena diyakini model ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan. Seentara kebijakan MPMBS ini masih relatif masih baru dan merupakan hasil adopsi negara lain, sehingga tanpa dukungan sumber daya dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaannya maka penyimpangan dapat terjadi dan tujuan peningkatan kinerja sekolah sulit terealisasi.

Mutu pendidikan dijadikan tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran karena mutu pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin sebagai hasil dari kegiatan belajar. Mutu pendidikan merupakan suatu alat untuk mengevaluasi kegiatan hasil pembelajaran di dalam sekolah. Dalam belajar mengajar biasanya manajemen

berbasis sekolah diperlukan untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah dan menghasilkan pendidikan yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri I Kecamatan Siatas Barita. Sebagaimana latar belakang masalah yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang melingkupi implementasi MBS yang memberdayakan kepala sekolah, guru, siswa, pegawai TU, dan komite sekolah di SMK Negeri 1 Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dalam konteks manajemen pendidikan merupakan fenomena yang sangat urgen untuk diungkap melalui penelitian dengan judul **“Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan yang masih sentralistik,
2. Rendahnya mutu lulusan sekolah,
3. Sarana dan prasarana pembelajaran yang sangat terbatas,
4. Kurikulum dan pembelajaran yang kurang berbasis masyarakat,
5. Kepemimpinan dan manajemen yang kurang berfokus pada mutu serta kurang akuntabel,
6. Rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah,

7. Dalam aspek manajemen tenaga kependidikan, manajemen keuangan dan pembiayaan perannya belum dijalankan secara optimal,
8. Kepala sekolah dalam penerapan manajemen berbasis sekolah antara kemandirian dan manajemen pengelolaan anggaran belum dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,
9. Kurangnya peran serta komite sekolah dalam pelaksanaan MBS di sekolah,
10. Masih minimnya sikap sebagian kecil orangtua yang masih acuh tak acuh terhadap perkembangan anak di sekolah,
11. Transparansi dan akuntabilitas kepala sekolah belum bersifat terbuka,
12. Guru yang bersifat acuh terhadap peningkatan kualitas pendidikan,
13. Banyaknya peserta didik dengan karakter yang berbeda,
14. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada keluaran pendidikan (output) telah memusatkan pada masukan (input) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan,
15. Minimnya partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,
16. Minimnya manajemen kurikulum dan program pengajaran dalam proses pembelajaran di sekolah,
17. Kurangnya tenaga kependidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah,
18. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang diharapkan,
19. Minimnya pengembangan program mengikuti anggaran,

20. Kurangnya partisipasi dalam persiapan anggaran,
21. Kurangnya partisipasi guru, komite sekolah dan peran serta masyarakat dalam menyusun program perencanaan,
22. Dalam proses pembelajaran guru belum mampu berkreasi,
23. Minimnya perhatian terhadap evaluasi program yang berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan,
24. Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang kurang demokratis dan memaksakan kehendak,
25. Tidak adanya monitoring atau kontrol yang intensif dan berkesinambungan terhadap upaya implementasi program kurikulum yang *sustainability*,
26. Program kurikulum 2013 Revisi belum ditetapkan belum mampu diimplementasikan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan,
27. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai,
28. Manajemen pelaksanaan MBS yang kurang baik,
29. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen,
30. Peran serta masyarakat terutama orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.

1.3 Batasan Masalah

Agar fokus pada bahasan titik permasalahan, maka peneliti membatasi masalah, dengan pembatasan pembahasan permasalahan di bawah ini maka aka

menyelesaikan masalah yang lain dalam Pelaksanaan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Adapun fokus batasan masalah sebagai berikut:

1. Proses Manajemen Kurikulum dan program pengajaran dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri I Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
2. Proses Manajemen Tenaga Kependidikan dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita
3. Proses Manajemen Kesiswaan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri I Kecamatan Siatas Barita
4. Proses Manajemen Keuangan dan pembiayaan dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita
5. Proses Manajemen Sarana dan Prasarana dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita
6. Proses Manajemen Hubungan sekolah dan masyarakat dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita
7. Permasalahan dan Solusi dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita

8. Dampak positif dari implementasi manajemen berbasis sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Siatas Barita.

1.4 Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Manajemen Kurikulum dan program pengajaran dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri I Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara?
2. Bagaimana Proses Manajemen Tenaga Kependidikan dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita?
3. Bagaimana Proses Manajemen Kesiswaan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri I Kecamatan Siatas Barita ?
4. Bagaimana Proses Manajemen Keuangan dan pembiayaan dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita?
5. Bagaimana Proses Manajemen Sarana dan Prasarana dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita?
6. Bagaimana Proses Manajemen Hubungan sekolah dan masyarakat dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita?

7. Bagaimana Analisis Permasalahan dan Solusi dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita?
8. Bagaimana Analisis Dampak positif dari implementasi manajemen berbasis sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Siatas Barita terhadap Mutu Pendidikan?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri I Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Proses Manajemen Kurikulum dan program pengajaran dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri I Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara
2. Untuk mendeskripsikan Proses Manajemen Tenaga Kependidikan dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita
3. Untuk mendeskripsikan Proses Manajemen Kesiswaan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri I Kecamatan Siatas Barita

4. Untuk mendeskripsikan Proses Manajemen Keuangan dan pembiayaan dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita
5. Untuk mendeskripsikan Manajemen Sarana dan Prasarana dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita
6. Untuk mendeskripsikan Proses Manajemen Hubungan sekolah dan masyarakat dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita
7. Untuk menganalisis Permasalahan dan Solusi dalam penerapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Kecamatan Siatas Barita
8. Untuk menganalisis Dampak positif dari manajemen berbasis sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Siatas Barita

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya teori-teori manajemen pendidikan dalam kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah. Melalui penelitian yang dilakukan ini dapat diungkapkan keragaman model implementasi manajemen berbasis sekolah sesuai dengan kultur sosial dan kebutuhan sekolah yang dapat memperkaya keragaman

pengimplementasian manajemen berbasis sekolah. Dengan mengkaji pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dapat dipahami secara utuh wujud pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.

Masyarakat, khususnya orang tua siswa sebagai bahan pertimbangan untuk ikut berpartisipasi aktif terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi kepala sekolah, guru dan staff SMK Negeri 1 Siatas Barita,
Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat praktis bagi praktek pengelolaan pendidikan di SMK Negeri 1 Siatas Barita demi perbaikan pengelolaan sekolah kedepannya.
- b. Kepala sekolah sejenis
Dapat dijadikan bahan masukan bagi kepala sekolah dan guru dalam melakukan suatu perencanaan pendidikan yang tepat dan efektif.
- c. Kepala Dinas Pendidikan
Sebagai bahan rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah di tingkat SMK/ sederajat
- d. Peneliti Lain
Sebagai bahan rujukan penelitian yang relevan dan rekomendasi untuk pengembangan penelitian berikutnya